**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat di daerah tersebut dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk merangsang pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah tersebut serta semakin kecilnya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan proses kenaikan pendapatan per kapita daerah tersebut dalam jangka panjang. Teori ekonomi mengatakan bahwa faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya permintaan barang dan jasa dari luar daerah tersebut, sehingga sumber daya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah sekaligus dapat menciptakan peluang kerja di daerah tersebut. Hal ini berarti bahwa sumber daya lokal baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia memegang kunci yang sangat strategis dalam perekonomian suatu daerah. Sumber daya lokal yang merupakan potensi ekonomi harus dapat dikembangkan secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Mengelola dan memanfaatkan kekayaan serta potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka perhatian utama ditujukan untuk melihat kegiatan ekonomi yakni dengan mengetahui kontribusi setiap sektor perekonomian daerah yang terdiri atas sembilan lapangan usaha atau sektor perekonomian, yaitu sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan hotel dan restoran; sektor angkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; sektor jasa-jasa.

Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan semaksimal mungkin potensi wilayah yang dimilikinya dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan sistem pemerintah *desentralisasi* maka segala urusan kebijakan regional diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Undang-Undang ini diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2001 yang mengatur kewenangan setiap kabupaten/kota untuk menjalankan rumah tangganya sendiri.

Keberadaan Undang-Undang otonomi daerah ini diharapkan memberikan dampak positif kepada daerah, yaitu terciptanya daerah-daerah pertumbuhan baru di kabupaten/kota. Model pembangunan ini menggantikan model pembangunan terpusat (*desentralisasi*) yang selama ini dianggap oleh banyak kalangan sebagai penyebab lambatnya pembangunan di daerah, sehingga memperbesar ketimpangan pembangunan antar daerah. Dengan model pembangunan yang baru ini diharapkan dapat menciptakan percepatan pembangunan daerah, sehingga daerah yang selama ini lambat untuk berkembang akan mampu untuk memacu ketertinggalannya.

Kondisi lain yang muncul akibat Undang-Undang tersebut adalah timbulnya dampak persaingan antar wilayah dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk menghasilkan output sebesar-besarnya, atau dengan kata lain bahwa setiap wilayah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia harus dapat meningkatkan kemampuan produktivitasnya dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Persaingan antar daerah yang terjadi diharapkan menjadi pola persaingan yang sehat, sehingga mampu dijadikan pemicu dan penentu keberhasilan pembangunan di daerah. Salah satu strategi yang dapat dilakukan dalam meningkatkan daya saing daerah adalah dengan pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah (Bappenas, 2010).

Mengingat bahwa Kabupaten Bulukumba adalah daerah yang berbasis sektor pertanian, maka potensi sektor pertanian di Kabupaten Bulukumba dapat lebih ditumbuhkembangkan dan dimaksimalkan perolehan hasil-hasilnya, sehinggga dapat menunujang upaya peningkatan penerimaan daerah terutama dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai daerah yang berbasis sektor pertanian, sebagian besar lahan yang tersedia dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Lahan sawah di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2011 seluas 22.458 ha. Menurut jenisnya pengairannya, terdiri dari lahan sawah irigasi teknis 0 hektar, irigasi setengah teknis 11.181 ha (50 persen), 9.055 hektar irigasi sederhana, irigasi desa, non PU (40 persen), lahan sawah tadah hujan/pasang surut 2.222 hektar (10 persen). Luas tanaman perkebunan di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2011 seluas 39.493 hektar, dan luas kawasan hutan pada tahun 2011 sebesar 8.453,25 hektar. Di samping itu, sektor pertanian dalam tahun 2011 mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 99.284 orang. Sektor penyerap tenaga kerja terbesar lainnya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 24.393 orang, kemudian diikuti oleh sektor jasa kemasyarakatan sebesar 17.820 orang, dan selanjutnya diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 14.074 orang.

Selama tahun 2007-2011, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba secara umum terus mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari kenaikan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2007-2011 dan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2007-2011 dengan rata-rata sebesar 6,51 persen pertahun. Hal ini disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba Atas Dasas Harga Konstan (ADHK) 2000 Tahun 2007-2011

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tahun | Harga Berlaku | Harga Konstan |
| Jumlah (Juta Rp) | Pertumbuhan (%) | Jumlah (Juta Rp) | Pertumbuhan (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 20072008200920102011 | 2.201.346,392.711.096,803.255.210,153.763.053,254.286.358,32 | 11,3923,1620,0715,6013,91 | 1.424.821,831.539.670,151.639.311,551.742.032,851.853.159,41 | 5,368,066,476,276,38 |
| Rata-Rata | - | 16,83 | - | 6,51 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bulukumba Tahun 2011*

Tabel 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2007-2011 mengalami peningkatan dan penurunan atau berfluktuasi. Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba berada pada kisaran 5,36 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2008 sekitar 8,06 persen. Pada tahun 2009 mengalami penurunan yaitu 6,47 persen sedangkan pada tahun 2010 kembali mengalami penurunan pada kisaran 6,27 persen. Kemudian pada tahun 2011 mengalami peningkatan sekitar 6,38 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2007-2011 lebih besar di dukung oleh sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat pada struktur ekonomi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2007-2011 yang disajikan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Data *Distribusi Persentase* *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2007-2011 (%)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lapangan Usaha | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Rata-Rata |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Pertanian | 55,29 | 54,87 | 52,92 | 51,07 | 47,94 | 52,418 |
| Pertambangan dan Penggalian | 0,37 | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,53 | 0,428 |
| Industri Pengolahan | 6,91 | 6,69 | 6,53 | 6,58 | 6,64 | 6,670 |
| Listirk, Gas dan Air Bersih | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,418 |
| Bangunan | 2,67 | 2,96 | 3,01 | 2,97 | 3,26 | 2,974 |
| Perdagangan, Hotel dan Restoran | 12,47 | 13,00 | 14,53 | 15,82 | 17,67 | 14,698 |
| Angkutan dan Komunikasi | 2,08 | 2,15 | 2,26 | 2,34 | 2,64 | 2,294 |
| Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 4,45 | 4,54 | 4,66 | 5,40 | 6,23 | 5,056 |
| Jasa-Jasa | 15,36 | 15,01 | 15,28 | 14,94 | 14,61 | 15,040 |

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bulukumba Tahun 2011*

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2007-2011 sektor pertanian masih merupakan tumpuan bagi perekonomian Kabupaten Bulukumba. Rata-rata kontribusi sektor pertanian pada pembentukan PDRB Kabupaten Bulukumba adalah sebesar 52,418 persen. Kemudian diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 15,040 persen, kemudian diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 14,698 persen. Selanjutnya, diikuti oleh sektor industri pengelohan sebesar 6,670 persen dan diikuti pula oleh sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 5,056 persen. Kemudian diikuti oleh sektor bangunan sebesar 2,974 persen, terus dilanjutkan oleh sektor angkutan dan komunikasi sebesar 2,294 persen. Kemudian disusul oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,428 persen terus disusul oleh sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 0,418 persen.

Menyadari pentingnya peningkatan dan pengembangan komoditas yang dihasilkan oleh subsektor pada sektor pertanian di Kabupaten Bulukumba, maka peneliti tertarik untuk “ Menganalisis Subsektor dan Komoditas Unggulan Pada Sektor Pertanian Di Kabupaten Bulukumba”

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Subsektor apakah yang menjadi unggulan pada sektor pertanian di Kabupaten Bulukumba?
2. Komoditas apakah yang menjadi unggulan pada masing-masing subsektor pada sektor pertanian di Kabupaten Bulukumba?
3. Komoditas apakah yang menjadi unggulan secara keseluruhan pada sektor pertanian di Kabupaten Bulukumba?
4. **Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui subsektor unggulan pada sektor pertanian di Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui komoditas unggulan pada masing-masing subsektor pada sektor pertanian di Kabupaten Bulukumba.
3. Untuk mengetahui komoditas unggulan secara keseluruhan pada sektor pertanian di Kabupaten Bulukumba.
4. **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat Akademis
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai masalah subsektor dan komoditas unggulan pada sektor pertanian di Kabupaten Bulukumba
3. Sebagai acuan bagi peneliti lainnya di bidang yang sama untuk dijadikan bahan perbandingan dan bahan referensi.
4. Manfaat Praktis
5. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan atau informasi bagi pemerintah daerah khusus pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan komoditas dan subsektor unggulan pada sektor pertanian di Kabupaten Bulukumba.

1. Bagi Masyarakat Petani

Sebagai bahan informasi untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing komoditasnya, baik di pasar lokal maupun regional.